



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 25 September 2020

Halaman: 2

PENGADAAN 8 LAHAN RTHP
Pemkot Yogya Siapkan Rp 21 Miliar

UMBULHARJO (MERAPI) - Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau publik (RTHP) dan fasilitas umum di Kota Yogyakarta yang sempat ditunda, akhirnya bakal direalisasikan. Pemkot Yogyakarta telah mengalokasikan pagu anggaran sekitar Rp 21 miliar dalam APBD Perubahan 2020 untuk pengadaan 8 lahan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum.

"Kami lakukan pencermatan skala prioritas dalam pengadaan lahan. Hasilnya dimungkinkan ada pengadaan lahan dengan skala prioritas untuk ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Wahyu Handoyo, Kamis (24/9).

Pengadaan lahan skala prioritas itu menggunakan anggaran dalam APBD Perubahan 2020. Menurutnya sisa waktu yang ada sekitar 2,5 bulan masih mencukupi untuk merealisasikan pengadaan 8 bidang lahan tersebut. Pengadaan lahan itu menjadi prioritas untuk pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum hasil usulan dari wilayah.

"Kami melihat dari sisi rencana tata kala pengadaan lahan masih dalam rentang waktu yang bisa dipenuhi. Ini menjadi upaya untuk pemenuhan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum," paparnya.

Pengadaan 8 bidang lahan itu untuk ruang terbuka hijau di Sorosutan, Ngampilan, Pakuncen, Prenggan dan Sosromenduran. Di samping itu pengadaan lahan untuk fasilitas umum Kelurahan Giwangan, tambahan lahan untuk Kelurahan Suryatmajan serta normalisasi simpang Jalan Tegalturi.

Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Sarmin menambahkan semua pengadaan lahan itu berdasarkan usulan wilayah. Untuk pengadaan lahan guna normalisasi simpang Tegalturi bertujuan memudahkan manuver kendaraan besar. Terutama sebagai antisipasi peningkatan jumlah kendaraan besar saat Embung Giwangan dan Taman Pintar kedua dioperasikan.

"Pengadaan lahan itu karena sebagian wilayah ada yang belum punya ruang terbuka hijau publik. Untuk Kelurahan Suryatmajan luasnya kini belum ideal maka ditambah pengadaan lahan guna area pendopo," ucap Sarmin.

Pihaknya optimis sisa waktu yang ada mencukupi untuk pengadaan 8 bidang lahan. Hal itu berkaca pada pengalaman pengadaan lahan di tahun 2018 dengan waktu yang hampir sama bisa menyelesaikan pengadaan lahan di 18 lokasi. Sesuai tata kala pengadaan lahan sampai pertengahan Desember 2020.

"Sekarang tahapannya pra verifikasi data. Kami sudah undang masing-masing pemilik lahan untuk pencermatan awal. Ini sekaligus untuk menekan potensi gagal pengadaan. Setelah itu akan dilakukan appraisal harga lahan," jelasnya. (Tri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005